



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PERTANIAN

**KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, maka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Laporan ini memuat kegiatan yang telah kami lakukan pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan pada tahun 2025. Laporan ini sangatlah penting untuk mengetahui capaian kegiatan, kendala dan hambatan yang dihadapi sehingga dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun yang akan datang. Tanpa menyebutkan satu persatu dan dengan rasa hormat yang sedalam- dalamnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyusun LKjIP pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2025.

Kami menyadari LKjIP ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan. Semoga laporan ini dapat dipergunakan dan dimanfaatkan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tabanan.



Singasana, 12 Pebruari 2026
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Tabanan

I Made Subagia, S.Pi, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660308 198903 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GRAFIK		iv
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1 Latar Belakang		1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi		4
1.3 Struktur Organisasi		4
1.4 Sistematika Penyajian		9
BAB II PERENCANAAN KINERJA		11
2.1 Rencana Strategis		11
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Strategis		11
2.1.2 Indikator Kinerja Utama		12
2.2 Program, Kegiatan dan penetapan Kinerja Tahun 2025		13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025		17
3.1 Capaian Kinerja		17
- Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025		
a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya		19
b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah		21
c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional		22
d. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang dilakukan		26
e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya		28
f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja		32
3.2 Prestasi Tahun 2025		50
BAB IV PENUTUP		54
4.1 Kesimpulan		54
4.2 Saran		54

Lampiran

- Surat Keputusan Lakip Tahun 2025
- Rencana, Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Pada Dinas Pertanian Kab Tabanan
- Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian Tahun 2025
- SK IKU

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Matrik Tujuan, Sasaran, dan Indikator Utama	11
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama	12
Tabel 2.3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Dinas Pertanian Tahun 2025	13
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tahun 2025	16
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025	17
Tabel 3.2 Peningkatan Produksi Padi Jagung dan Kedelai	18
Tabel 3.3 Peningkatan Produktivitas Padi Jagung dan Kedelai	18
Tabel 3.4 Pelayanan Kesehatan Hewan Tahun 2025	18
Tabel 3.5 Capaian persentase jumlah kelompok tani, subak dan subak abian yang dibina oleh penyuluh tahun 2025	19
Tabel 3.6 Capaian Kinerja	20
Tabel 3.7 Capaian Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah	21
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Provinsi Bali dan Dinas Pertanian Kabupaten Badung	22
Tabel 3.9 Analisa usahatani padi konvensional/ha	29
Tabel 3.10 Analisa usahatani padi ramah lingkungan	30
Tabel 3.11 Data Series Produksi Padi Jagung dan Kedelai	32
Tabel 3.12 Series Produktivitas Padi Jagung dan Kedelai	33
Tabel 3.13 Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan	35
Tabel 3.14 Rekapitulasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kabupaten Tabanan Tahun 2025	38
Tabel 3.15 Pembangunan Prasarana Pertanian Tahun 2025	39
Tabel 3.16 Hasil Vaksinasi Sapi Tahun 2025	40
Tabel 3.17 Hasil Vaksinasi Rabies	41
Tabel 3.18 Rincian Kasus Positif Rabies Tahun 2025	41
Tabel 3.19 Data Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tahun 2025 di Kabupaten Tabanan	42
Tabel 3.20 Capaian Program dan Kegiatan sesuai DPA Dinas Pertanian Tahun 2025	47
Tabel 3.21 Juara Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil Teladan	50
Tabel 3.22 Juara Balai Penyuluhan Pertanian Berprestasi	50
Tabel 3.23 Juara Gabungan Kelompok Tani Berprestasi	50
Tabel 3.24 Juara Petani Berprestasi	50

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perkembangan Produksi Padi di Kabupaten Tabanan	33
Grafik 3.2 Perkembangan Produksi Jagung dan kedelai di Kabupaten Tabanan	33
Grafik 3.3 Perkembangan Produktivitas Padi, Jagung dan kedelai di Kabupaten Tabanan	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dalam negeri, maka sesuai UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan diharapkan meningkat sampai 5,7-6,0% per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk mendukung pembangunan *good governance*, kebijakan pemerintah adalah ingin

menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam upaya mengembangkan sektor pertanian dimana upaya yang dilakukan melalui pendekatan pengembangan kawasan yang berbasis komoditas unggulan dengan melibatkan langsung peran aktif kelompok tani. Pendekatan pembangunan pertanian ke depan diarahkan pada pengembangan produk dan bukan lagi pengembangan komoditas serta lebih difokuskan pada pengembangan nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustri yang berdaya saing. Permasalahan yang sering timbul antara lain penguasaan data informasi di lapangan, kelembagaan sumber daya manusia, sarana alat dan mesin pengolahan dan penguasaan teknologi pengendalian mutu hasil.

Pengembangan serta strategi pertanian kedepan adalah pengembangan yang diarahkan bagi terwujudnya sentra- sentra produksi dan terintegrasi dengan *industry* ikutannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya yang terpadu dan berkelanjutan mulai dari hulu hingga kehilir seperti: perencanaan sistem, pembinaan sistem, penyediaan peralatan dan mesin, pengolahan, modal kerja, pelatihan kerjasama kemitraan, pengendalian dan pendampingan secara berkelanjutan.

Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate* agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Akuntabilitas publik merupakan

landasan utama bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Ini diperlukan karena aparat pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya. Akuntabilitas juga merupakan prasyarat mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjaminkewenangan tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan yang dapat diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas dan kejujuran dan hasil yang sebesar mungkin. Akuntabilitas publik yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah sangat terkait erat dengan kinerja instansi yang bersangkutan. Keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maupun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan terlihat dari pertanggungjawaban yang dilakukannya. Untuk menilai keberhasilan/kegagalan tersebut, pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan. Selama ini pengukuran terhadap kinerja instansi pemerintah lebih ditekankan kepada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran terlepas dari proses dan pelaksanaan kegiatan di lapangan, manfaat, keuntungan maupun dampak yang ditimbulkannya.

Dalam melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Berpijak pada konsep tersebut, maka indikator kinerja tidak saja dari aspek input, output tapi juga sampai pada outcome, benefits dan impact dari kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Pada gilirannya semua proses yang dilaksanakan untuk dinikmati masyarakat.

Ruang lingkup akuntabilitas kinerja ini, pada dasarnya berupaya untuk menjawab sasaran RPJMD kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Petanian Kabupaten Tabanan. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tanggungjawab /kewenangan OPD, maka setiap tahun setiap opd wajib

mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

-

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mempunyai tugas adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

1.3 Struktur Organisasi

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas rutin pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan diperlukan dukungan dana yang memadai. Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan sebagai suatu organisasi yang tugas pokok melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi di Bidang Pertanian (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008). Didasarkan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mempunyai fungsi sebagai :

- 1) perumus kebijakan di bidang pertanian;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas di bidang pertanian;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas, dengan 1 Sub. Bagian dan 5 bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan uraian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, yang membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan

3. Bidang prasarana dan sarana,
4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura,
5. Bidang Perkebunan, yang membawahi :
6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
7. Bidang Penyuluhan
8. UPTD Dinas
9. Jabatan Fungsional

Selanjutnya Uraian tugas masing-masing sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas:

- Memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja dinas pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
- Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
- Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi perizinan usaha pertanian;
- Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penyuluhan pertanian;
- Monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja dinas pertanian;
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sekretaris mempunyai tugas:

- Penyusunan perencanaan, program dan anggaran dinas pertanian;
- Koordinasi menyusun program kerja lingkup sekretariat;

- Koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
- Pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;
- Koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- Koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
- Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- Penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- Koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretaris dinas pertanian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:

- Menyusun program kerja sub bagian umum dan keuangan;
- Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi dan kearsipan);
- Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
- Melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- Menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- Menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
- Melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
- Menyusun perencanaan, program dan anggaran dinas pertanian;
- Menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
- Melaksanakan penatausahaan keuangan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan

anggaran;

- Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
- Menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan keuangan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas:

- Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang sarana dan prasarana;
- Penyusunan program kerja lingkup bidang sarana dan prasarana;
- Pelaksanaan kegiatan pengembangan prasarana pertanian;
- Pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian;
- Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang sarana dan prasarana; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas:

- Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang tanaman pangan dan holtikultura;
- Penyusunan program kerja lingkup bidang tanaman pangan dan holtikultura;
- Pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- Pelaksanaan kegiatan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain;
- Pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten;
- Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang tanaman pangan dan holtikultura; dan

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas:

- Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang perkebunan;
- Penyusunan program kerja lingkup bidang perkebunan;
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten;
- Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten;
- Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang perkebunan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

7. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas:

- Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- Penyusunan program kerja lingkup bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- Pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten;
- Pelaksanaan kegiatan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten;
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten;
- Pelaksanaan kegiatan pengembangan lahan penggembalaan umum;
- Pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;

- Pelaksanaan kegiatan fasilitasi izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
- Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas:

- Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang penyuluhan;
- Penyusunan program kerja lingkup bidang penyuluhan;
- Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian;
- Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang penyuluhan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

1.4 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan selama Tahun 2025 capaian kinerja (*performance result*) tersebut dibandingkan dengan perjanjian kinerja (*performance agreement*) tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Nomor B. 060/2700/B.ORG/SETDA Tahun 2024 Tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya

Bab II – Perencanaan Kinerja, dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal

penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja)

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, dalam bab ini diuraikan mengenai:

a. Capaian kinerja meliputi:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi/Perangkat Daerah;
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi anggaran yang menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi/Perangkat Daerah sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi/Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran-Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing – masing misi, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut. Indikator haruslah *Specific, Measurable Achievable, Relevant, dan Time Bond*.

Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian beserta indikatornya untuk masing-masing Misi, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Matrik Tujuan, Sasaran, dan Indikator Utama

MISI Bupati dan Wakil Bupati terpilih (Misi III)		TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial – ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD
		Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian	Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian, perkebunandan Peternakan	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian
			Meningkatkan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian

			Meningkatkan Produktivitas Peternakan	Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner
			Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh

2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai ukuran utama keberhasilan organisasi secara berkala dalam mencapai sasaran strategis organisasi, maka Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Pertanian serta RPJMD Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2021-2026 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%
2.	Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunandan Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	10%
3.	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	10%

4.	Meningkatkan Produktivitas Peternakan	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	99%
5.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	60%

Sumber: Renstra Dinas Pertanian

2.2 Program, Kegiatan, dan Penetapan Kinerja Tahun 2025

Di tahun 2025 Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mengelola 14 kegiatan dan 30 subkegiatan. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan termasuk besaran dana yang digunakan ditampilkan dalam dibawah. Dari dana yang dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2025 serta rencana target kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan, Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan menetapkan target kinerja yang akan dicapai di tahun 2025.

Tabel 2.3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Dinas Pertanian Tahun 2025

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
						Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
				DINAS PERTANIAN				38.806.986.854,00	
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				38.806.986.854,00	
3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				38.806.986.854,00	
3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	32.248.939.517,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

3	27	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	27	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	29.532.031.849,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	27	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	341.927.488,00	Pajak Air Permukaan
3	27	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	325.110.451,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1.791.598.786,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	253.270.943,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan prasarana pendukung pertanian	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 %	1.406.887.381,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	02	2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65%	1.269.008.069,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	02	2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 jenis	126.108.773,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)

3	27	02	2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Penyediaan benih/bibit	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 ekor	11.770.539,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	persentase peningkatan sarana dan prasarana pertanian	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 persen	4.726.238.737,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	03	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58 persen	484.796.993,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	03	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Meningkatnya Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137 unit	4.241.441.744,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99 persen	250.543.125,00	
3	27	04	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.000 ekor	208.000.406,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	04	2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140	42.542.719,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase BPP yang mengalami peningkatan prestasi	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 persen	174.378.094,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3	27	07	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil Meningkatkan Kelas	- Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39 %	174.378.094,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Difinisi Operasional / Formula	Target
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di OPD	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Hasil evaluasi inspektorat	90
2.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil evaluasi inspektorat	79
3.	Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan dan peternakan	Persentase Peningkatan Produktivitas Hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan	Nilai Produktivitas Komoditas Pertanian	10%
4	Meningkatkan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	10%
5	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan dan jumlah Unit Usaha yang tersertifikasi NKV	99%
6	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Meningkatnya Kelas Kemampuan Kelompok Meningkatkan Kompetensi Penyuluh	Jumlah Penyuluh dan petani yang Berprestasi	60%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

3.1 Capaian Kinerja

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan target dan realisasi kinerja adalah proses evaluasi untuk mengukur sejauh mana pencapaian aktual (realisasi) sesuai atau menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan (target). Dibawah ini adalah tabel capaian realisasi kinerja Dinas Pertanian tahun 2025.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Formula	Realisasi
1.	Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	Jumlah Realisasi dibagi dengan anggaran dikalikan seratus persen	80,55%
2.	Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	10%	Produksi tahun ini dikurangi produksi tahun sebelumnya dibagi produksi tahun sebelumnya dikalikan seratus persen	Padi: (0,15%) Jagung: (-46,81%) Kedelai: (-62,96%)
3.	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	10%	Produktivitas tahun ini dikurangi produktivitas tahun sebelumnya dibagi produktivitas tahun sebelumnya dikalikan seratus persen	Padi: (1,07%) Jagung: (-3,84%) Kedelai: (-41,53%)
4.	Meningkatkan Produktivitas Peternakan	Persentase Pelayanan Kesehatan hewan Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan Penerapan Pengawasan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	99%	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan dibagi Jumlah ternak dikalikan seratus persen	96,73%

5.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	60%	Jumlah kelompok tani, subak dan subak abian yang dibina oleh penyuluh dibagi total kelompok tani, subak dan subak abian yang dibina oleh penyuluh dikalikan	67,35%
----	--	--	-----	---	--------

Sumber: Data diolah

Data pada tabel diatas diperoleh dari perhitungan seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Peningkatan Produksi Padi Jagung dan Kedelai

Komoditas Pertanian	Produksi Tahun 2024 (ton)	Produksi Tahun 2025 (ton)	Persentase Peningkatan Produksi(%)
Padi	216.969	217.294	(0,15%)
Jagung	14.056	7.476	(-46,81%)
Kedelai	270	100	(-62,96%)

Sumber: Data Statistik Pertanian

Tabel 3.3 Peningkatan Produktivitas Padi Jagung dan Kedelai

Komoditas Pertanian	Produktivitas Tahun 2024 (kw/ha)	Produktivitas Tahun 2025 (kw/ha)	Persentase Peningkatan Produktivitas
Padi	59,81	60,45	(1,07%)
Jagung	64,62	62,14	(-3,84%)
Kedelai	17,65	10,32	(-41,53%)

Sumber: Data Statistik Pertanian

Tabel 3.4 Pelayanan Kesehatan Hewan Tahun 2025

No	Uraian	Target	Realisasi	Persentase %
1	Vaksinasi PMK	17.775	17.775	100

No	Uraian	Target	Realisasi	Persentase %
2	Vaksinasi Rabies	54.726	51.989	95
3	Pemasangan Eartag	10.479	10.479	100
4	Penerbitan SKKH	650	650	100
	Jumlah	83.630	80.893	96,73

Sumber: Data Statistik Pertanian

Tabel 3.5 CAPAIAN PERSENTASE JUMLAH KELOMPOK TANI, SUBAK DAN SUBAK ABIAN YANG DIBINA OLEH PENYULUH TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELOMPOK TANI, SUBAK DAN SUBAK ABIAN YANG DIBINA OLEH PENYULUH	JUMLAH KELOMPOK TANI, SUBAK DAN SUBAK ABIAN (data akhir tahun 2025)	PROSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5 ($\frac{3}{4} \times 100$ %)
1	Baturiti	179	281	63,57
2	Kediri	160	196	81,63
3	Kerambitan	152	290	60,25
4	Marga	167	329	56,00
5	Penebel	379	485	78,14
6	Pupuan	109	200	54,50
7	Selemadeg	110	173	63,57
8	Selemadeg Barat	126	198	63,57
9	Selemadeg Timur	196	279	70,25
10	Tabanan	160	195	82,05
	Jumlah/Rata-rata	1738	2626	67,35

Sumber: Data diolah

g. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan kinerja, tabel di bawah ini merinci perbandingan capaian utama pada Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Analisis ini berfungsi sebagai dasar

untuk perencanaan strategis di masa mendatang.

Tabel 3.6 Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Formula	Capaian 2025	Capaian 2024
1.	Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	Jumlah Realisasi dibagi dengan anggaran dikalikan seratus persen	84,42%	80,55%
2.	Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	10%	Produksi tahun ini dikurangi produksi tahun sebelumnya dibagi produksi tahun sebelumnya dikalikan seratus persen	Padi: (0,15%) Jagung: (-46,81%) Kedelai: (-62,96%)	Padi: 17,35% Jagung: 14,63% Kedelai: (-0,85%)
3.	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	10%	Produktivitas tahun ini dikurangi produktivitas tahun sebelumnya dibagi produktivitas tahun sebelumnya dikalikan seratus persen	Padi: (1,07%) Jagung: (-3,84%) Kedelai: (-41,53%)	Padi: 4,78% Jagung: (-12,15%) Kedelai: (-12,23%)
4.	Meningkatkan Produktivitas Peternakan	Persentase pelayanan kesehatan hewan Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan Penerapan Pengawasan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	99%	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan dibagi Jumlah ternak dikalikan seratus persen	96,73%	96%
5.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	60%	Jumlah kelompok tani, subak dan subak abian yang dibina oleh penyuluh dibagi total kelompok tani, subak dan subak abian yang dibina oleh penyuluh dikalikan	67,35%	66,05%

Sumber: Data Diolah

h. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.7 Capaian Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Formula	Capaian 2025	Capaian 2024	Capaian 2023	Capaian 2022
1.	Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	Jumlah Realisasi dibagi dengan anggaran dikalikan seratus persen	84,42%	80,55%	85,18%	86,90%
2.	Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	10%	Produksi tahun ini dikurangi produksi tahun sebelumnya dibagi produksi tahun sebelumnya dikalikan seratus persen	Padi: (0,15%) Jagung: (-46,81%) Kedelai: (-62,96%)	Padi: 17,35% Jagung: 14,63% Kedelai: (-0,85%)	Padi: (-0,12%) Jagung: (-0,16%) Kedelai: (186,1%)	Padi: 6,14% Jagung: 15,47% Kedelai: 61,77%
3.	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan Produktivitas Pertanian	10%	Produktivitas tahun ini dikurangi produktivitas tahun sebelumnya dibagi produktivitas tahun sebelumnya dikalikan seratus persen	Padi: (1,07%) Jagung: (-3,84%) Kedelai: (-41,53%)	Padi: 4,78% Jagung: (-12,15%) Kedelai: (-12,23%)	Padi: (-0,013%) Jagung: (25,53%) Kedelai: (21,66%)	Padi: 7,6% Jagung: (19,1%) Kedelai: (2%)
4.	Meningkatkan Produktivitas Peternakan	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan Penerapan Pengawasan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	99%	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan dibagi Jumlah ternak dikalikan seratus persen	96,73%	96%	96,6%	98,15%
5.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibangun oleh penyuluh	60%	Jumlah kelompok tani, subak dan subak abian yang dibangun oleh penyuluh dibagi total kelompok	67,35%	66,05%	63,57%	100%

				tani, subak dan subak abian yang dibina oleh penyuluh dikalikan				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Statistik Pertanian

Produksi dan Produktivitas padi jagung dan kedelai mengalami fluktuasi karena adanya fenomena el nino dimana menyebabkan curah hujan lebih rendah, kekeringan panjang, dan pergeseran musim tanam, yang berakibat pada mundurnya musim panen dan penurunan luas panen. Lahan produktif (sawah) terus berkurang akibat konversi menjadi pemukiman, atau alih komoditas yang dianggap lebih menguntungkan. Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dan terus-menerus merusak kesuburan tanah alami. Serangan hama tanaman yang sering terjadi. Mayoritas petani sudah lanjut usia, yang mempengaruhi efisiensi dan kemampuan mengadopsi teknologi baru.

i. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Provinsi Bali dan Dinas Pertanian Kabupaten Badung

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Formula	Capaian Dinas Pertanian Kab. Tabanan 2025	Capaian Nasional (Kementrian Pertanian) Tahun 2024	Capaian Dinas Pertanian Provinsi Bali Tahun 2024	Capaian Dinas Pertanian Kabupaten Badung Tahun 2024
1.	Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Terselenggaraanya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	Jumlah Realisasi dibagi dengan anggaran dikalikan seratus persen	84,42%	-	-	-
2.	Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	10%	Produksi tahun ini dikurangi produksi tahun sebelumnya dibagi produksi tahun sebelumnya dikalikan seratus persen	Padi: (-6,39%) Jagung: (-46,81%) Kedelai: (-62,96%)	Padi : (-1,55) Jagung: 2,47	Padi: 6,15	101%

3.	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	10%	Produktivitas tahun ini dikurangi produktivitas tahun sebelumnya dibagi produktivitas tahun sebelumnya dikalikan seratus persen	Padi: (-2,56%) Jagung: (-3,84%) Kedelai: (-41,53%)	Padi: 0,78% Jagung: 0,78% Kedelai: 1,83%	Padi: (-0,14%)	100%
4.	Meningkatkan Produktivitas Peternakan	Persentase pelayanan kesehatan hewan Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan Penerapan Pengawasan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	99%	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan dibagi Jumlah ternak dikalikan seratus persen	96%	80,62	100%	100%
5.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	60%	Jumlah kelompok tani, subak dan subak abian yang dibina oleh penyuluh dibagi total kelompok tani, subak dan subak abian yang dibina oleh penyuluh dikalikan	66,05%	22,06%	100%	100%

Berdasarkan data Kinerja tahun 2023-2024 Kementerian Pertanian, produksi tanaman pangan secara keseluruhan mengalami peningkatan 0,46%. Produksi padi mengalami penurunan sebesar 1,55%, dari 53,98 juta ton pada 2023 menjadi 53,14 juta ton pada 2024, sementara produksi jagung meningkat sebesar 2,47%, dari 19,99 juta ton menjadi 20,48 juta ton pada periode yang sama. Perkembangan produksi dan luas panen padi selama lima tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan fluktuasi dan cenderung menurun. Penurunan luas panen dan produksi padi terjadi tahun 2020 dan 2021, dimana pada tahun 2022 terjadi peningkatan namun kembali menurun di tahun 2023 dan 2024 dengan rata-rata penurunan dalam 5 tahun terakhir untuk luas panen sebesar 1,46% dan produksi sebesar 0,69%. Meskipun dari sisi produksi dan luas panen. mengalami penurunan, namun produktivitas padi selama lima tahun terakhir menunjukkan positif dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,78%.

Berdasarkan data Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2024 bahwa Perkembangan selama lima tahun terakhir produksi padi,

palawija dan hortikultura di Bali masih sangat berfluktuasi selain karena faktor iklim yang tidak menentu dan juga akibat serangan OPT. Walaupun produksi pangan masih relatif konstan tetapi Bali masih mampu memberikan tingkat penyediaan pangan yang cukup untuk penduduk dengan berbagai program yang dapat meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan. ketersediaan pangan utama pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan pada komoditi beras, bawang merah, cabe rawit, daging sapi hal ini disebabkan oleh meningkatnya produksi pada masing – masing komoditi tersebut selain itu adanya impor masuk juga mempengaruhi ketersediaan bahan pangan pokok pada tahun 2024.

Berdasarkan data Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Badung Bali Tahun 2024 Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, dengan target fisik yaitu Jumlah kelompok yang memanfaatkan sarana pertanian sesuai ketentuan (Juknis) adalah sebanyak 127 Kelompok dan teralisasi sebanyak 127 kelompok(100%) dengan pagu pagu sebesar Rp.16.455.105.760 dan terealisasi sebesar Rp.11.272.420.408 (68,50%) disebabkan karena pada sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian terdapat aktivitas yaitu pemberian subsidi AUTS yang tidak dapat dilaksanakan karena pembatalan kebijakan dari kementerian pertanian terkait perjanjian kerjasama AUTS. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan target fisik yaitu Persentase Peningkatan populasi ternak komoditas unggulan (Sapi) sebesar 0,4% tercapai 0,4% (100%) dengan pagu anggaran Rp.272.658.360 dan realisasi anggaran Rp.202.398.560 (74,23%). Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari satu sub kegiatan dengan target Jumlah sampel pakan yang diperiksa untuk memenuhi standar mutu sebanyak 25 sampel dan terealisasi sebanyak 25 sampel (100%) dengan pagu anggaran Rp.34.070.600 dan realisasi sebesar Rp.32.681.500 (95,92%). Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari satu sub kegiatan dengan target fisik

Jumlah kelompok Ternak yang memperoleh pembinaan sebanyak 9 kelompok terealisasi sebanyak 9 kelompok (100%) dengan pagu Rp.64.269.500 hanya terealisasi Rp.12.940.600 (20,13%). Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota Lain yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, dengan target fisik yaitu Jumlah ternak yang terpelihara baik dengan pemberian pakan berkualitas sebanyak 400 ekor dan terealisasi sebanyak 200 ekor (50%) dengan pagu Rp.2.773.046.598 dengan realisasi Rp.649.051.598 (23,41%) disebabkan karena sub kegiatan pengadaan bibit ternak yang sumber pendanaan dari belanja hibah sebagian tidak terealisasi akibat adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.10/4473/SJ terkait penundaan pemberian hibah menjelang pilkada. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian yang terdiri dari satu sub kegiatan dengan target fisik yaitu Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen (100%), dengan pagu Rp.57.317.900 dan realisasi keuangan sebesar Rp.21.429.100 (37,39%) yang disebabkan karena pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya terdapat beberapa aktivitas tidak tersedia dananya. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, dengan target fisik yaitu Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun sebanyak 7 unit dan teralisasi sebanyak 8 unit (114%) dengan pagu Rp.15.899.941.489 dengan realisasi Rp.10.152.153.996 (63,85%) disebabkan karena terdapat belanja modal tanah untuk gedung RPH Mambal tidak dapat dilaksanakan akibat tidak tersedianya dana. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari satu sub kegiatan dengan target fisik yaitu Jumlah hewan/ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan sebanyak 13 laporan dan terealisasi sebanyak 13 laporan (100%) dengan pagu Rp. 3.352.816.490 serta serapan anggaran sebanyak Rp.2.709.184.880 (80,80%). Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terdiri dari dua sub kegiatan dengan target Jumlah tempat/lokasi pemotongan Hewan/Ternak dan dagingnya yang diawasi sebanyak 62 lokasi teralisasi sebanyak 62 lokasi (100%), dengan pagu Rp. 137.488.466 dan realisasi

anggaran sebanyak Rp.130.898.710 (95,21%). Program Penyuluhan Pertanian terdiri dari satu kegiatan 4 (empat) sub kegiatan , dengan target Persentase Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan adalah sebanyak 100%, dan realisasi sebanyak 100%, dengan total pagu Rp.1.681.781.890 dengan serapan anggaran senilai Rp.1.598.470.780 (95,65%).

j. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Produksi padi tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produksi padi tahun 2024. Begitu pula dengan komoditas unggulan lainnya jagung dan kedelai. Hal ini karena:

- Cuaca yang tidak mendukung akibat adanya fenomena El Nino menyebabkan curah hujan lebih rendah dan musim tanam bergeser, sehingga luas tanam turun, berpengaruh kepada produksi yang mengalami penurunan pula.
- Turunnya produksi juga dipengaruhi oleh adanya berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan dari pertanian menjadi perumahan
- Terjadinya degradasi lahan diakibatkan penggunaan pupuk dan bahan kimia intensif yang terus menerus, mengakibatkan penurunan produktivitas tanah.
- Ketersediaan pupuk yang tidak tepat waktu, serta pengurangan subsidi pupuk dapat menurunkan produksi dan produktivitas tanaman.
- Kendala dalam budidaya jagung adalah rendahnya penggunaan benih hibrida, dan hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Petani enggan menanam secara swadaya
- Produktivitas juga dipengaruhi oleh teknik budi daya, jarak tanam dan proses perhitungan sample ubinan, anakan per rumpun, jumlah serangan, jenis varietas, penggunaan pupuk kurang tepat. Jagung mengalami penurunan produktivitas karena lokasi pengambilan ubinan yang mendukung, penggunaan pupuk berimbang, system perawatan yang intensif.

- Kendala dalam budidaya kedelai adalah karena harga beli yang kurang menarik jika dibandingkan dengan padi atau jagung. Petani enggan menanam secara swadaya
- Masih adanya pemilik anjing yang tidak mau memberikan anjingnya untuk diambil sampelnya walaupun anjing yang menggigit beresiko tinggi, sehingga perlu diberikan pemahaman tentang bahaya dari penyakit rabies.
- Semua depo obat hewan belum memiliki rekomendasi ijin dari dinas teknis dan obat yang dijual masih ada yang kadaluarsa sehingga perlu ditertibkan lagi.
- Kurangnya pengetahuan dan kesadaran peternak tentang kesehatan hewan sehingga keinginan untuk melakukan upaya pencegahan dan sanitasi kandang masih rendah.
- Dari hasil pemantauan dan pengawasan di tempat pemotongan diluar RPH ditemukan pembuangan limbah ke sungai dan tidak ada tempat penampungan limbah.

Solusi yang dilakukan antara lain:

- Menggunakan varietas unggul bermutu dan bersertifikat untuk hasil panen yang tinggi dan tahan penyakit.
 - Memberdayakan Petugas Penyuluh Lapangan untuk mengedukasi petani untuk menerapkan pemupukan yang berimbang, menggunakan pupuk organik dan pestisida nabati untuk menjaga kesehatan tanah.
 - Memberdayakan petugas POPT untuk mengedukasi tentang pengendalian hama, seperti penggunaan pestisida tepat waktu, untuk mengurangi kerugian hasil panen
 - Menggunakan alat mesin pertanian untuk mempercepat olah tanam
- Upaya yang telah dilakukan antara lain dengan mengusulkan kegiatan untuk peremajaan komoditi perkebunan utamanya kopi secara berkelanjutan.
- Peremajaan dan intensifikasi tanaman kakao
 - Pengawalan dan pendampingan
 - Pengendalian OPT dan penerapan PHT

- Pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan
- Indikasi geografis
- Pemberdayaan petugas pengamat OPT
- Agroindustri komoditi kakao
- Pemasaran, akses pasar, dan pelayanan informasi pasar
- Pembinaan usaha komoditi kakao
- Sistem jaminan mutu
- Melakukan promosi
- Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya dan dampak penyakit rabies perlu dilakukan sosialisasi secara berkesinambungan dengan melibatkan jajaran dinas dan seluruh masyarakat Kabupaten Tabanan.
- Perlu dilakukan penertiban terhadap penjual obat hewan yang tidak memiliki ijin dari dinas teknis dan memasarkan obat yang kadaluarsa.
- Untuk menumbuhkan kesadaran peternak tentang pentingnya kesehatan hewan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peternak tentang kesehatan hewan perlu dilakukan penyuluhan/sosialisasi secara terus-menerus baik melalui jalur formal maupun informal.
- Pemotongan babi diluar RPH belum mempunyai penampungan limbah, disarankan untuk melakukan pemotongan di RPH sesuai dengan Perbub. Nomor 67 Tahun 2013.

k. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Pertanian adalah sangat penting untuk memastikan bahwa pertanian berkelanjutan secara ekologis dan menguntungkan secara ekonomis disamping itu bermanfaat dalam memberikan data untuk merancang program subsidi yang lebih tepat sasaran, kebijakan irigasi, atau penyuluhan pertanian yang efektif untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, membantu mengidentifikasi praktik terbaik, mengurangi biaya produksi, meningkatkan hasil panen, dan memaksimalkan

pendapatan

Tabel 3.9 ANALISA USAHATANI PADI KONVENSIONAL/HA

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA (RP)	JUMLAH
I	TENAGA KERJA				
A.	Pra Tanam, Tanam dan Pemeliharaan				
	1. Penyiapan lahan dan menyemai				
	a. Pembersihan lahan	13	OH	100.000	1.300.000
	b. Pembuatan pesemaian dan menyemai	2	OH	100.000	200.000
	2. Pengolahan Tanah				
	a. Membajak	100	Are	25.000	2.500.000
	b. Menggaru	2	OH	100.000	200.000
	c. Mencangkul sekeliling pematang	6	OH	100.000	600.000
	3. Menanam	100	Are	17.000	1.700.000
	4. Pupukan Organik	2	OH	0	0
	5. Pupukan An-organik	2	OH	100.000	200.000
	6. Menyiang	17	OH	100.000	1.700.000
	7. Aplikasi pupuk cair dan pestisida	8	OH	100.000	800.000
	8. Pengairan	3	OH	100.000	300.000
	Jumlah A				9.500.000
B.	Pasca Panen				
	1. Panen	72	Kw	85.000	6.120.000
	2. Pengangkutan	72	kw	10.000	720.000
	3. Karung	100	BH	3.000	300.000
	Jumlah				
	JUMLAH TENAGA KERJA (I)				7.140.000
II	SARANA PRODUKSI				
1	Benih	25	kg	13.000	325.000
2	Pupuk				
	a. An-Organik				
	- Urea	200	kg	7.600	1.520.000
	- NPK	275	kg	12.800	3.520.000
	b. Organik				
	- Pupuk organik padat	0	kg	1.000	0
	- Pupuk Organik cair	2	litr	150.000	300.000
	Jumlah Pupuk				5.665.000
3	Pestisida				
	a. Insektisida				
	-Convido	1	kg	120.000	120.000
	b. Herbisida				

	Ally	100	gr	1.360	136.000
	c. Fungisida				
	- Folia	200	ml	700	140.000
	- Scor 200 MI	500	ml	720	360.000
	Jumlah Pestisida				756.000
	JUMLAH SARANA PRODUKSI (II)				6.421.000
III.	PENGELUARAN LAIN-LAIN				
	- PAJAK	0,4	Th	300.000	120.000
	JUMLAH PENGELUARAN LAIN-LAIN (III)				
	JUMLAH TOTAL (I + II + III)				13.561.000
IV	PENDAPATAN				
	1. Penjualan	7200	kg	5.800	41.760.000
	JUMLAH KEUNTUNGAN				28.199.000

B/C Ratio = Total pendapatan : Total biaya = 28.199.000 :
13.561.000 =

2,079418922

Tabel 3.10 ANALISA USAHATANI PADI RAMAH LINGKUNGAN

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA (RP)	JUMLAH
I	TENAGA KERJA				
A.	Pra Tanam, Tanam dan Pemeliharaan				
	1. Penyiapan lahan dan menyemai				
	a. Pembersihan lahan	13	OH	100.000	1.300.000
	b. Pembuatan pesemaian dan menyemai	2	OH	100.000	200.000
	2. Pengolahan Tanah				
	a. Membajak	100	Are	25.000	2.500.000
	b. Menggaru	2	OH	100.000	200.000
	c. Mencangkul sekeliling pematang	6	OH	100.000	600.000
	3. Menanam	100	Are	17.000	1.700.000
	4. Pemupukan Organik	12	OH	100.000	1.200.000
	5. Pemupukan An-organik	2	OH	100.000	200.000
	6. Menyiang	17	OH	100.000	1.700.000
	7. Aplikasi pupuk cair dan pestisida	8	OH	100.000	800.000
	8. Pengairan	3	OH	100.000	300.000
	Jumlah A				10.700.000

B.	Pasca Panen				
	1. Panen	56	Kw	85.000	4.760.000
	2. Pengangkutan	56	kw	10.000	560.000
	3. Karung	56	BH	3.000	168.000
	Jumlah				
	JUMLAH TENAGA KERJA (I)				5.488.000
II	SARANA PRODUKSI				
1	Benih	25	kg	13.000	325.000
2	Pupuk				
	a. An-Organik				
	- Urea	50	kg	7.600	380.000
	- NPK	100	kg	12.800	1.280.000
	b. Organik				
	- Pupuk organik padat	400	kg	2.000	800.000
	- Pupuk Organik cair	20	Box	125.000	2.500.000
	Jumlah Pupuk				5.285.000
3	Pestisida				
	a. Insektisida				
	-Convindo	0	kg	120.000	0
	b. Herbisida				
	Ally	0	gr	1.360	0
	c. Fungisida				
	- Filia	0	ml	700	0
	- Scor 200 MI	0	ml	720	0
	Jumlah Pestisida				0
	JUMLAH SARANA PRODUKSI (II)				5.285.000
III.	PENGELUARAN LAIN-LAIN				
	- PAJAK	0,4	Th	300.000	120.000
	JUMLAH PENGELUARAN LAIN-LAIN (III)				
	JUMLAH TOTAL (I + II + III)				10.773.000
IV	PENDAPATAN				
	1. Penjualan	5514	kg	5.800	31.981.200
	JUMLAH KEUNTUNGAN				21.208.200

B/C Ratio = Total pendapatan : Total biaya = 21.208.200 :10.773.000 =

1,9686

I. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program di Dinas Pertanian sepanjang tahun 2025 yang mendukung pencapaian keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja antara lain:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

adalah upaya strategis pemerintah untuk menjamin ketersediaan input dalam upaya meningkatkan produksi, produktivitas dan kesejahteraan petani.

Hasil data series produksi, produktivitas padi jagung kedelai dapat diamati pada tabel dibawah:

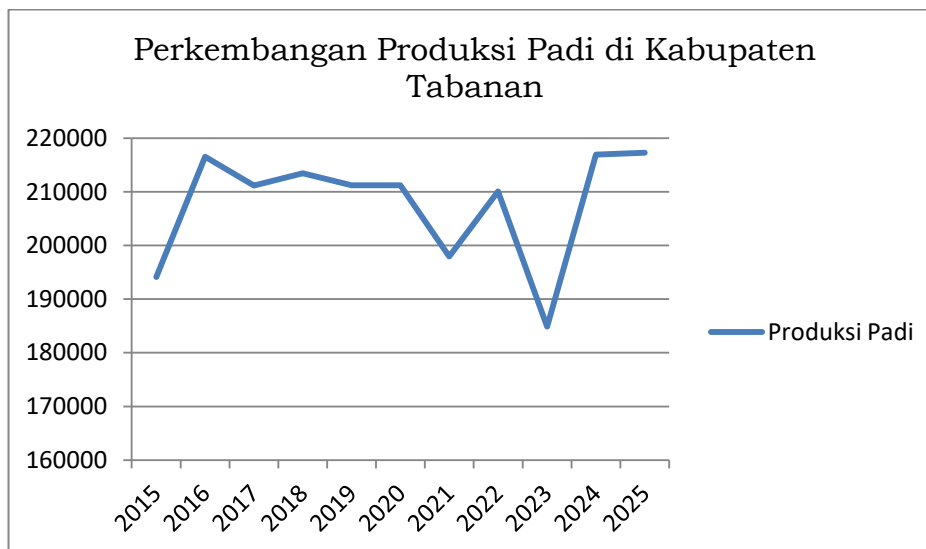
Tabel 3.11 Data Series Produksi Padi Jagung dan Kedelai

Komoditas Unggulan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Padi (ton)	194.122	216.547	211.178	213.482	211.243	211.243	197.933	210.095	184.883	216.969	217.294
Jagung (ton)	5.035	7.369	8.691	8.901	8.691	1.440	12.713	14.680	12.262	14.056	7.476
Kedelai (ton)	679	1.280	1.107	2.411	1.896	153	395	639	1.828	270	100

Sumber: Statistik Pertanian

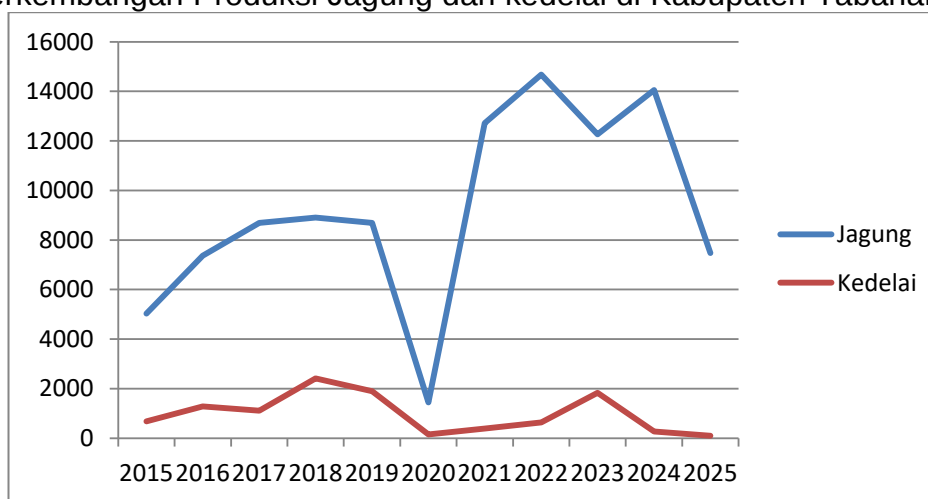
Secara umum produksi padi, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan jagung dan kedelai mengalami penurunan dibandingkan produksi tahun sebelumnya. Hal ini karena Harga kedelai lokal seringkali tidak menarik dibanding biaya produksi dan kedelai impor yang lebih murah akibat kebijakan impor, dan subsidi kurang memadai membuat petani enggan menanam jagung dan kedelai. Jika dituangkan dalam grafik, perkembangan produksi seperti grafik dibawah.

Grafik 3.1 Perkembangan Produksi Padi di Kabupaten Tabanan



Sumber: Data Diolah

Grafik 3.2 Perkembangan Produksi Jagung dan kedelai di Kabupaten Tabanan



Sumber: Data Diolah

Tabel 3.12 Series Produktivitas Padi Jagung dan Kedelai

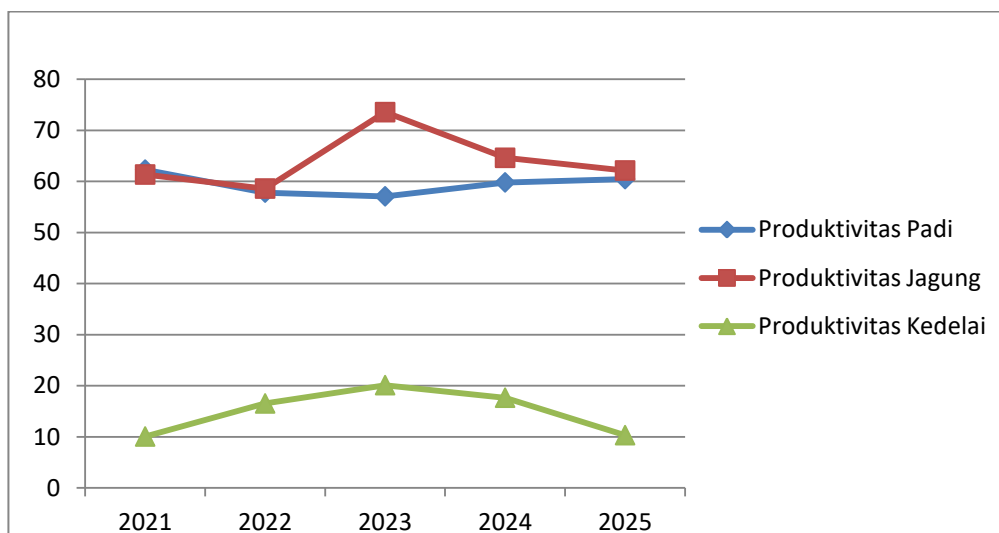
Komoditas Pertanian	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Padi	62,31	57,81	57,08	59,81	60,45
Jagung	61,35	58,60	73,56	64,62	62,14

Kedelai	10,06	16,53	20,11	17,65	10,32
---------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Data Diolah

Produktivitas padi meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan Jagung dan Kedelai mengalami penurunan produktivitas jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini karena Penggunaan benih unggul belum merata. Banyak petani masih menggunakan benih lokal yang potensinya lebih rendah dibandingkan varietas hibrida. Penerapan teknologi budidaya modern masih rendah, dan petani cenderung mempertahankan metode tradisional, yang mengakibatkan efisiensi produksi rendah. Serangan hama dan penyakit (khususnya ulat grayak pada jagung) yang sering kali merusak tanaman dan menurunkan hasil panen. Petani enggan menanam kedelai karena harganya sering kali kurang menarik dibandingkan komoditas lain (seperti padi atau jagung), membuat pendapatan mereka rendah. Ketergantungan pada kedelai impor yang lebih murah membuat kedelai lokal kalah bersaing, sehingga produksinya stagnan.

Grafik Perkembangan Produktivitas Padi, Jagung dan kedelai di Kabupaten Tabanan



Kabupaten Tabanan, yang sering dijuluki sebagai "Lumbung Beras Bali",

juga memiliki potensi perkebunan yang sangat signifikan. Sektor perkebunan di Tabanan menjadi salah satu tulang punggung ekonomi lokal, terutama di wilayah dataran tinggi seperti Pupuan dan Baturiti. Komoditas yang dihasilkan ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga diekspor dan mendukung agrowisata. Dibawah ini adalah tabel hasil produksi komoditas unggulan perkebunan di kabupaten Tabanan, serta persentase peningkatan produksi dibandingkan dengan tahun lalu.

Tabel 3.13 Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan

No	JENIS KOMODITAS	Luas Areal Tanaman Menghasilka n (Ha)	Produksi (Ton)					Persentase Peningkatan Produksi
			2025	2022	2023	2024	2025	
1	KELAPA HYBRIDA	3,50	0,30	1,39	1,20	1,21	0,83	
2	KELAPA GENJAH	3,50	251,36	258,51	435,37	431,37	-0,92	
3	KELAPA DALAM	647,30	15.165,29	15.126,78	15.735,89	15.793,50	0,37	
4	KAKAO	15.038,42	942,06	1.048,54	937,18	933,030	-0,44	
5	KOPI ARABIKA	4.529,51	24,14	14,36	16,00	16,21	1,31	
6	KOPI ROBUSTA	907,99	5.327,27	4.285,18	4.804,16	4.480,80	-6,73	
7	CENGKEH	9.584,87	145,05	202,65	348,79	348,87	0,02	
8	PANILI	2.365,87	-	-	-	-	-	
9	LADA	9,43	-	-	-	-	-	
10	KEMIRI		11,04	11,54	11,80	11,83	0,25	
11	PALA	20,74	8,80	8,89	17,40	17,41	0,06	
12	AREN	101,07	9,45	9,63	10,15	10,19	0,39	

Sumber: Statistik Pertanian

Dari tabel dapat dilihat bahwa beberapa komoditas perkebunan mengalami penurunan dari tahun 2024. Hanya kelapa hibrida, kelapa dalam, kopi Arabica, cengkeh, kemiri, pala dan aren yang mengalami peningkatan produksi. Hal ini disebabkan karena kualitas bibit yang rendah serta kurangnya penggunaan pupuk, iklim yang tidak mendukung di tahun 2024, dan adanya anomaly iklim. Pengendalian OPT dilakukan secara swadaya. Belum adanya petugas pengamat OPT di kabupaten. Pengendalian OPT masih ditangani oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali. Upaya

yang telah dilakukan antara lain dengan mengusulkan kegiatan untuk peremajaan komoditi perkebunan utamanya kopi secara berkelanjutan. Permasalahan yang dialami terkait dengan rendahnya produktivitas tanaman yang masih rendah antara lain pemangkasan belum intensif, pengendalian OPT belum optimal, sanitasi kebun belum optimal, pemupukan belum maksimal, tanaman sudah tua dan kurang peremajaan. Langkah-langkah pengembangan komoditi perkebunan di Kabupaten Tabanan antara lain:

- Peremajaan dan intensifikasi tanaman kakao
- Pengawalan dan pendampingan
- Pengendalian OPT dan penerapan PHT
- Pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan
- Indikasi geografis
- Pemberdayaan petugas pengamat OPT
- Agroindustri komoditi kakao
- Pemasaran, akses pasar, dan pelayanan informasi pasar
- Pembinaan usaha komoditi kakao
- Sistem jaminan mutu
- Melakukan promosi

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini selain berfokus pada pengembangan prasarana pertanian, juga pembangunan prasarana meliputi peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang vital bagi proses produksi pertanian. Tujuan utamanya adalah menciptakan pertanian yang lebih tangguh terhadap tantangan iklim, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan mampu bersaing di pasar. Program ini memprioritaskan perbaikan saluran irigasi, pembangunan dam parit, serta penyediaan pompa air untuk memastikan distribusi air merata ke seluruh lahan pertanian, mengurangi risiko kekeringan, dan mendukung pola tanam yang optimal.

Salah satu tujuan program ini adalah bagaimana petani untuk mendapatkan akses pupuk dengan harga terjangkau. Penyaluran pupuk bersubsidi adalah sebuah proses rumit yang melibatkan banyak pihak. Proses dimulai dengan verifikasi dan validasi data petani. Melalui sistem digitalisasi e-RDKK, petugas

penyuluh pertanian lapangan (PPL memastikan bahwa petani yang berhak menerima subsidi benar-benar terdaftar dan sesuai kriteria Peraturan Menteri Pertanian. Keakuratan data ini sangat vital, menjadi penentu kuota pupuk yang akan dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui provinsi. pembatasan jenis pupuk bersubsidi menjadi hanya Urea dan NPK, serta keharusan menggunakan Kartu Tani atau KTP untuk pembelian. Berikut disajikan alokasi pupuk bersubsidi di kabupaten Tabanan tahun 2025.

Berdasarkan data, dapat diamati bahwa sepanjang tahun 2025, Dinas Pertanian mengalokasikan tiga jenis pupuk yaitu Urea, NPK dan NPK Formula.

**Tabel 3.14 REKAPITULASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025**

PERIODE LAPORAN : Januari –Des 2025

No	Kecamatan	Alokasi dan Realisasi Pupuk Bersubsidi (Kg)								
		Urea			NPK			NPK Formula		
		Alokasi	Realisasi	% Real	Alokasi	Real	% Real	Alokasi	Real	% Real
1	Selemadeg Barat	437.000	310.500	71,05	198.000	190.650	96,29	499.400	364.200	72,93
2	Selemadeg	500.000	401.650	80,33	465.279	444.050	95,44	8.600	2.450	28,49
3	Selemadeg Timur	800.000	669.676	83,71	920.000	881.359	95,80	-	-	-
4	Kerambitan	1.080.000	758.550	70,24	867.000	842.200	97,14	-	-	-
5	Tabanan	904.000	687.650	76,07	681.000	656.800	96,45	-	-	-
6	Kediri	1.275.000	1.006.842	78,97	1.141.721	1.115.956	97,74	-	-	-
7	Marga	918.000	622.750	67,84	707.000	677.050	95,76	-	-	-
8	Baturiti	575.000	471.000	81,91	480.000	461.100	96,06	-	-	-
9	Penebel	1.553.000	1.062.800	68,44	875.000	847.100	96,81	-	-	-
10	Pupuan	305.000	205.350	67,33	976.000	963.250	98,69	-	-	-
	Jumlah :	8.347.000	6.196.768	74,24	7.311.000	7.079.515	96,83	508.000	366.650	72,18

Pembangunan prasarana pertanian memegang peran sentral dan krusial dalam menjamin ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Prasarana seperti jaringan irigasi yang efisien memastikan pasokan air yang memadai ke lahan pertanian, mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan, dan memungkinkan petani untuk meningkatkan intensitas tanam. Prasarana yang baik, memudahkan pengangkutan input produksi (pupuk, benih) ke lahan dan hasil panen ke pasar atau tempat pengolahan, mengurangi biaya logistik dan kerugian pascapanen. Pembangunan prasarana yang dilakukan sepanjang tahun 2025 yakni sesuai tabel dibawah:

Tabel 3.15 Pembangunan Prasarana Pertanian Tahun 2025

No	Jenis Prasarana	Alamat	Jumlah Pembangunan
1	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Mundeh,Kecamatan Selemadeg Barat	1 Paket
2	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Subak Aseman IV, Kec. Selemadeg Timur	1 Paket
3	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Tegal Blaye, Kec. Kerambitan	1 Paket
4	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Subak AsemanIV, Kec Selemadeg Timur	1 Paket
5	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Tempek Gunggungan I	1 Paket
6	Pembangunan Saluran Irigasi	Tempek Payangan, Subak Tuka (hibah uang)	1 Paket
7	Rabat Beton Jalan Usaha Tani	Br Karyasari, Kec.Pupuan (hibah uang)	1 Paket

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program kesehatan hewan memastikan bahwa hewan tetap produktif, mengurangi kerugian ekonomi akibat penyakit, dan menjamin pasokan daging, susu, dan produk hewani lainnya yang aman serta konsisten. Petani dan komunitas pedesaan secara langsung merasakan manfaat ekonomi dari ternak yang sehat. Program ini berfungsi sebagai garis pertahanan pertama terhadap penyakit zoonosis yakni penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia.

Dalam hal pelayanan kesehatan hewan selain dilakukan vaksinasi rabies

untuk hewan peliharaan, juga dilakukan pemberian obat-obatan untuk ternak sapi di kelompok ternak serta melakukan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku. Munculnya penyakit kuku dan mulut pada bulan Juli 2022 sehingga perlu dilakukan kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan.

Tabel 3.16 Hasil Vaksinasi Sapi Tahun 2025

NO	KECAMATAN	ESTIMASI Populasi	HASIL VAKSINASI							
			SAPI							TOTAL VAKSINASI
			I	II	III	IV	V	VI	VII	
1	BATURITI	12.325	1.192	11	219	1808	302	0	0	1.554
2	KEDIRI	2.045	242	95	92	86	446	87	0	85
3	KERAMBITAN	1.585	222	742	377	181	131	49	0	345
4	MARGA	4.680	620	271	658	340	576	0	0	905
5	PENEBEL	7.860	417	55	0	981	0	0	0	2.095
6	PUPUAN	239	33	33	2	16	10	0	0	88
7	SELEMADEG	3.020	332	336	340	366	0	0	0	1.085
8	SELEMADEG BARAT	2.629	445	184	1.071	176	0	0	0	759
9	SELEMADEG TIMUR	4.244	601	471	367	888	1	0	0	1.193
10	TABANAN	1.219	475	403	531	87	235	99	70	160
TOTAL		39.846	4.582	2.601	3.657	4.929	1.701	235	70	8.269

Sumber: Statistik Peternakan

Rabies adalah salah satu penyakit yang bersifat zoonosis atau dalam kata lain bisa menular dari hewan ke manusia dengan tingkat kematian yang sangat tinggi. Tak hanya menyerang anjing, tetapi mamalia berdarah panas juga memiliki risiko tinggi dalam penularan penyakit rabies ini. Rabies ini bisa menyerang hewan sejak lahir. Maka dari itu, perlu dilakukan vaksinasi rabies sejak dini demi mencegah terjangkitnya virus tersebut bagi para hewan peliharaan. Tingkat efektivitas vaksin rabies ini 100%, sehingga sangat penting dilakukan sebagai langkah awal pencegahan rabies.

Tabel 3.17 Hasil Vaksinasi Rabies

KECAMATAN	POPULASI ANJING	HEWAN			TOTAL VAKSINASI
		ANJING	KUCING	MONYET	
Baturiti	4.748	4.685	0	0	4.685
Kediri	7.779	6.549	58	0	6.607
Kerambitan	6.124	5.240	9	0	5.249
Marga	4.740	4.001	18	0	4.019
Penebel	5.697	6.565	6	0	6.571
Pupuan	6.367	3.662	177	2	5.841
Selemadeg	3.696	3.730	83	0	3.813
Selemadeg Barat	5.245	730	28	0	4.758
Selemadeg Timur	3.966	3.688	158	0	4.635
Tabanan	6.365	5.640	171	0	5.811
TOTAL	54.726	44.490	708	2	51.989

Sumber: Statistik Peternakan

Tabel 3.18 Rincian Kasus Positif Rabies Tahun 2025

No.	Kecamatan	Desa	Spesies	Tanggal Kasus
1	Kediri	Banjar Anyar	Anjing	02/01/2025
2	Marga	Kukuh	Anjing	11/02/2025
3	Tabanan	Delod Peken	Anjing	10/03/2025
4	Tabanan	Dauh Peken	Anjing	14/03/2025
5	Kediri	Kediri	Anjing	24/03/2025
6	Kediri	Pandak Gede	Anjing	15/04/2025
7	Pupuan	Pujungan	Anjing	22/09/2025
8	Marga	Marga	Anjing	08/10/2025
9	Pupuan	Belatungan	Anjing	20/10/2025
10	Kediri	Banjar Anyar	Anjing	05/11/2025
11	Tabanan	Dajan Peken	Anjing	05/11/2025
12	Tabanan	Dajan Peken	Anjing	17/11/2025
13	Pupuan	Kebon Padangan	Anjing	24/11/2025

Kasus positif yang terjadi pada anjing tersebut di atas merupakan anjing liar yang belum pernah mendapatkan vaksinasi rabies. Dari hal tersebut di atas

dapat kita evaluasi bahwa masih diperlukan program vaksinasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan dengan minimal cakupan vaksinasi 70%, sehingga dapat menimbulkan kekebalan/*Heard Immunity* pada Hewan Penular Rabies (HPR) dan Hewan Rentan PMK (HRP). Adapun yang perlu dilakukan adalah selalu menggencarkan atau mensosialisasikan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pada masyarakat tentang pentingnya program vaksinasi.

Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Dinas Pertanian melalui bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan pangan asal hewan. Pemeriksaan ini mengeluarkan sertifikat Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). Tahun 2025 jumlah SKKH yang dikeluarkan dapat dilihat dari tabel

Tabel 3.19 Data Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tahun 2025 di Kabupaten Tabanan

NO	NAMA UNIT USAHA	KOMO DITAS	PEMILIK	ALAMAT	JUMLAH SKKH (BUAH)	JUMLAH BAP (LBR)	JUMLAH TERNAK (EKOR)
1	UD. AGRO SARI SATWA	SAPI	I Gusti Made Putra Wibawa	Br. Basangbe, Ds. Perean Kangin, Baturiti, Tabanan	124	14	2.953
2	CV. PORODISA MAKMUR SEJAHTERA	SAPI	Viktor Rizwan Tumade	Jl. Durian No. 4, Voorfo, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	3	3	657
3	CV. WAHANA AGRO MANDIRI	SAPI	DRH. I MADE ALIT NEKER	Jl. Astasura No. 98 Denpasar	2	2	30
4	UD. DIFA BERKAH	SAPI	BUDI MULYONO	Banjar Anyar, Kediri, Tabanan	62	12	1.475
5	CV. SINAR AGRO NUSA RAYA	SAPI	SAYID ROFI MUBAROK	Br. Candikuning II, Ds. Candikuning, Kec. Baturiti, Tabanan	51	7	1.267

6	UD. MERTHA SARI	SAPI	I WAYAN WIDARTA	Br. Babakan Kangin, Ds. Gulingan, Mengwi, Kab. Badung	105	9	2.485
7	UD. DUA CAHAYA	SAPI	AZIZUDIN	Br. Munduk Asem, Ds. Cupel, Kec. Negara , Kab. Jembrana	14	3	322
8	UD. SUMBER REJEKI	SAPI	I NYOMAN WIJAYA	Br. Dinas Bangkang Mayung, Kel Meliling, Kec. Kerambitan, Tabanan	12	2	248
9	PT. SINAR MITRA DEWATA	SAPI	JOKO DI WIBOWO	Jl. Pendidikan II No. A1, Br. Graha Kerti, Denpasar Selatan	68	21	1.712
10	I KETUT SUDIARSANA	SAPI	I KETUT SUDIARSANA	Br. Dinas Desa Tengah, Desa Bebandem, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem	21	5	440
11	I PUTU EKA SARI PUTRA	SAPI	I PUTU EKA SARI PUTRA	Br. Lateng Sibang Kaja, Desa Sibang Kaja, Kec. Abiansemal, Badung.	55	16	1.105
12	ANDRE SIFANI PUTRA	SAPI	ANDRE SIFANI PUTRA	Br. Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kec. Kediri, Tabanan	45	10	1.154
13	YUDI RIHI	SAPI	YUDI RIHI	Jl. Pulau Moyo Gg Subaksari Permai, No. 6, Desa/ Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar	2	1	44
14	HIZMI	SAPI	HIZMI	Br. Munduk Asem, Ds. Cupel, Kec. Negara, Kab. Jembrana	2	2	45
15	UD. BATU INDAH	SAPI	I WAYAN SUDIARSA	Br. Batunya, Ds. Batunya, Kec. Baturiti, Tabanan	12	2	240
16	LINGGOM NAINGGOLAN	SAPI	LINGGOM NAINGGOLAN	KABUPATEN KARANGASEM	75	16	5.965
17	CV. WIJAYA KARYA BUANA	KAMBI NG	CV. WIJAYA KARYA BUANA	DENPASAR	16	3	1.370
18	CV. GITA BALI BERSAMA	BABI	DEWA AYU GEDE TARA DAMAYANTHI	Jl. Gunung Agung No. 28, Ds. Dajan Peken, Tabanan	5	1	200

19	SAYU SRI ANITA DEWI	BABI	Ni Komang Sayu Sri Anita Dewi	Jalan Gelatik No. 21, Link. Pendem, Kel. Pendem, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana	845	107	15.434.000
20	DRH. I KADEK RESEAN SPATIALE	BABI	DRH. I KADEK RESEAN SPATIALE	Perum Pesona Udayana Blok B Nomor 2 Jimbaran	90	3	90.000
21	PT. JAPFA COMFEED INDONESIA	DOC	M. FEBRI HASAN BASRI	Br. Sekargula, Ds. Mekarsari, Baturiti, Tabanan	1	13	25.000
22	PT. JAPFA COMFEED INDONESIA	AYAM AFKIR	M. FEBRI HASAN BASRI	Br. Dinas Batungsel Kaja, Desa Batungsel, Pupuan, Tabanan	111	32	3.085.000
23	MUHAMMAD AINUL MUTAQIN	PULLE T	MUHAMMAD AINUL MUTAQIN	Jl. Tukad Pancoran No. 10 Denpasar	2	2	60
24	CV. SUMERTA JAYA	DOC	I DEWA PUTU SUMERTA	Br. Beng Utara, Desa Tunjuk, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan	1	1	21
TOTAL					1.724	287	

Diharapkan dengan pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner meningkatkan derajat hewan di Kabupaten Tabanan.

4. Program Penyuluhan Pertanian

Perwujudan program ini adalah Pengembangan kapasitas petani dan kelembagaan kelompok tani dalam upaya meningkatkan daya saing petani dalam pengembangan sistem agribisnis di Kabupaten Tabanan. Kapasitas petani dapat meningkat sejalan dengan partisipasi mereka dalam kelembagaan petani.

Tahun 2025 penyuluh membina kelompok tani, subak dan subak abian sebanyak 1.738 kelompok. Di akhir tahun 2025 berdasarkan data akhir tahun 2025 jumlah kelompok tani, subak dan subak abian yang ada sebanyak 2.626 kelompok. Sehingga persentase capaian jumlah kelompok tani, subak dan subak abian yang terbina tahun 2025 sebanyak 67,35%

Kapasitas petani dan partisipasi mereka dalam kelembagaan petani akan mendorong kapasitas kelembagaan menjadi lebih efektif. Terlaksananya kegiatan

penyuluh yang tepat guna, tersusunnya Programa Tk. Desa, Tk. Kecamatan dan Tk. Kabupaten, untuk meningkatkan kualitas data kelembagaan penyuluh melalui paket data, dan mampu mendukung kegiatan operasional penyuluh yang ada di Kabupaten Tabanan.

Kelembagaan kelompok petani merupakan sarana sekaligus sasaran penyuluhan pertanian sehingga keberadaannya sangat diperlukan. Berkaitan dengan situasi ini, penguatan kapasitas kelembagaan kelompok petani memerlukan komitmen bagi kelembagaan penyuluhan, terutama kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah, untuk melaksanakan tugas yang semestinya. Kelembagaan penyuluhan pertanian merupakan salah satu wadah organisasi yang terdapat dalam Dinas Pertanian. Fungsi utama dari kelembagaan penyuluhan pertanian adalah sebagai wadah dan organisasi pengembangan sumberdaya manusia pertanian serta menyelenggarakan penyuluhan.

Kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan adalah Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BPPPK), kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat desa adalah kelompok tani yang melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian pada hakikatnya dilaksanakan untuk membantu petani agar mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi di lapangan. dari sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa. Terseleksinya kelembagaan petani, Gapoktan, KEP dan mendorong penerapan teknologi petani secara berkelanjutan dan meningkatkan teknologi kelembagaan petani sehingga tersusunnya programa Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten, Meningkatkan kemampuan kelembagaan petani, melalui pengembangan kapasitas manajerial, kepemimpinan dan kewirausahaan agar petani mampu menjadi wirausaha yang berprestasi, Terlaksananya penilaian kelembagaan petani secara berjenjang di Tingkat desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten, Terlaksananya seleksi Kelembagaan Ekonomi Petani, Poktan dan Gapoktan.

Permasalahan yang ada di bidang penyuluhan adalah jumlah tenaga Penyuluh Pertanian yang ada di Kabupaten baik tenaga Penyuluh PNS, PPPK dan Penyuluh Pertanian Swadaya belum mencukupi seperti yang diharapkan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/Permentan/OT.140/10/2011

Tanggal : 31 Oktober 2011 tentang Pedoman Formasi Jabatan Penyuluhan Pertanian. Kondisi ini menyebabkan kurang optimalnya pelayanan penyuluhan pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha yang mengusahakan komoditas hortikultura, perkebunan dan peternakan. Kondisi ini tentu akan terus berlanjut mengingat makin banyak tenaga penyuluh PNS yang sudah mencapai usia pensiun, sementara pengangkatan tenaga penyuluh setiap tahunnya hampir tidak ada. Untuk melaksanakan fungsi dan peran penyuluh, menuntut adanya peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian untuk mewujudkan Penyuluh Pertanian yang profesional. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UUSP3K) mengisyaratkan bahwa pekerjaan Penyuluh Pertanian merupakan profesi. Dalam rangka mengimplementasikan semangat Undang Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, diperlukan standar kompetensi yang mencerminkan profesionalismenya seorang Penyuluh Pertanian. Standar kompetensi tersebut dijabarkan dalam bentuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penyuluh Pertanian. Namun dari semua penyuluh yang ada baru beberapa orang saja yang telah memiliki sertifikat standar kompetensi melalui sertifikasi yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pelatihan 39 Petanian, namun dari semua sertifikat yang dimiliki semua sudah habis masa berlakunya dan perlu uji kompetensi kembali. Berkaitan dengan ketengaan penyuluhan dijumpai beberapa permasalahan yaitu:

1. Wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP) sangat luas (lebih dari 1 desa, bahkan 1 penyuluh mewilayahi 5 desa) sehingga tidak bisa melakukan penyuluhan secara optimal;
2. Minimnya formasi peningkatan kompetensi penyuluh, seperti latihan dasar, sertifikasi dan uji kompetensi penyuluh;
3. Kurangnya program pelatihan bagi penyuluh swadaya, dalam upaya peningkatan kapasitas penyuluh swadaya

**Tabel 3.20 Capaian Program dan Kegiatan sesuai DPA Dinas Pertanian
Tahun 2025**

Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian	Sisa
Dinas Pertanian	26.896.270.680	22.705.200.928	84,42	4.191.069.752
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	19.596.645.880	18.174.733.678	92,74	1.421.912.202
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	4.542.835	90,86	457.165
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	2.735.311	91,18	264.689
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.807.524	90,38	192.476
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.629.226.000	16.594.217.548	94,13	1.035.008.452
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.626.226.000	16.591.566.522	94,13	1.034.659.478
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	3.000.000	2.651.026	88,37	348.974
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.170.400	113.938.437	76,38	35.231.963
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	480.630	32,04	1.019.370
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000	1.808.745	72,35	691.255
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.559.000	48.818.385	70,18	20.740.615
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	3.340.600	66,81	1.659.400
Penyediaan Bahan/Material	55.217.400	49.510.289	89,66	5.707.111
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.394.000	9.979.788	96,01	414.212
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000		0,00	5.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	93.976.000	90.712.600	96,53	3.263.400
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93.976.000	90.712.600	96,53	3.263.400
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.364.349.880	1.044.459.835	76,55	319.890.045
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	5.000.000	50,00	5.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000	136.254.127	68,13	63.745.873
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.154.349.880	903.205.708	78,24	251.144.172

Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah	354.923.600	326.862.423	92,09	28.061.177
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kencaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.988.000	65.059.800	72,30	24.928.200
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.935.600	62.261.199	95,88	2.674.401
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	200.000.000	199.541.424	99,77	458.576
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.865.837.800	1.278.245.806	33,07	2.587.591.994
Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.751.109.800	199.694.268	7,26	2.551.415.532
Pengawasan Penggunaan Sarana Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Pertanian	2.625.806.000	88.791.445	3,38	2.537.014.555
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	125.303.800	110.902.823	88,51	14.400.977
Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	123.398.000	95.005.490	76,99	28.392.510
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SGD Hewan/Tanaman	49.655.000	38.458.151	77,45	11.196.849
Pemanfaatan SDG Hewan /Tanaman	73.743.000	56.547.339	76,68	17.195.661
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota Lain	991.330.000	983.546.048	99,21	7.783.952
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	991.330.000	983.546.048	99,21	7.783.952
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.962.611.000	2.820.146.873	95,19	142.464.127
Pengembangan Prasarana Pertanian	765.233.000	668.725.035	87,39	96.507.965
Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	457.000.000	425.428.210	93,09	31.571.790
Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	108.233.000	96.360.701	89,03	11.872.299
Penyusunan Peta kawasan Lahan dan lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di kabupaten/kota	200.000.000	146.936.124	73,47	53.063.876
Pembangunan Prasarana Pertanian	2.197.378.000	2.151.421.838	97,91	45.956.162
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.197.378.000	2.151.421.838	97,91	45.956.162

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	286.535.000	276.252.004	96,41	10.282.996
Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/ kota	250.000.000	243.465.975	97,39	6.534.025
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	243.465.975	97,39	6.534.025
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	36.535.000	32.786.029	89,74	3.748.971
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	36.535.000	32.786.029	89,74	3.748.971
Program Penyuluhan Pertanian	184.641.000	155.822.567	84,39	28.818.433
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	184.641.000	155.822.567	84,39	28.818.433
Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	92.203.000	74.055.506	80,32	18.147.494
Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	72.645.000	65.404.761	90,03	7.240.239
Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	19.793.000	16.362.300	82,67	3.430.700

Realisasi anggaran tahun 2025 dari segi keuangan rata-rata sudah mendekati 100%. Beberapa sub kegiatan seperti Pengawasan Penggunaan Sarana Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Pertanian dibawah 50% karena Belum memiliki gambaran teknis bangunan yang merupakan panduan utama dan dokumne penting dalam proses kontruksi. Disamping itu sesuai dengan audiensi dengan Bupati Tabanan dan mencermati perkiraan cuaca BMKG dimana hujan intensitas tinggi menyebabkan aktivitas lapangan terhenti dan penundaan proyek kontruksi, timbulnya genangan air dan erosi tanah di lokasi kontruksi. Dikhawatirkan menimbulkan biaya tambahan untuk perbaikan kerusakan. Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dibawah 50% karena penyedia memasang harga lebih dari pagu sehingga tidak bisa diamprah.

3.2 Prestasi Tahun 2025

Prestasi pada tahun 2025 yang diraih Dinas Pertanian antara lain:

Tabel 3.21 Juara Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil Teladan terlampir:

No.	Nama Penyuluh Pertanian	BPP	Nilai Hasil Perhitungan	No.
1.	Ayu Rahmawatiningsih, S.P	Selemadeg Barat	359	I
2.	Ir. I Wayan Artanaya, M.P	Selemadeg	349	II
3.	Kadek Ratna Dewi, S.P	Marga	242	III

Tabel 3.22 Juara Balai Penyuluhan Pertanian Berprestasi terlampir:

No.	Nama Balai Penyuluhan Kecamatan	Nilai Hasil Perhitungan	Juara
1.	BPP Kecamatan Baturiti	534	I
2.	BPP Kecamatan Pupuan	520	II
3.	BPP Selemadeg Timur	495	III

Tabel 3.23 Juara Gabungan Kelompok Tani Berprestasi terlampir:

No.	Nama Gapoktan	Kecamatan	Nilai Hasil Perhitungan	Juara
1.	Perkumpulan Langgeng Ari Guna	Selemadeg Barat	699	I
2.	Subak Rejasa	Penebel	639	II
3.	Subak Timpag	Kerambitan	637	III

Tabel 3.24 Juara Petani Berprestasi terlampir:

No.	Nama Petani	Kecamatan	Nilai Hasil Perhitungan	Juara
1.	I Kadek Ogi Darmawan	Pupuan	792,75	I
2.	I Made Suka Artawa	Selemadeg Barat	785,5	II
3.	I Made Sukerta	Kerambitan	714,5	III

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan menyajikan keberhasilan dan kegagalan yang di tahun 2025. Berbagai capaian tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
- Hasil kinerja program yang tercermin dalam IKU, secara umum dapat mencapai target yang ditetapkan, namun ada juga sasaran yang tidak dapat tercapai namun tetap mengalami peningkatan.
- Hasil kinerja keuangan, capaian sasaran secara umum telah mampu mendekati seratus persen. Sisanya tidak diampah karena efisiensi.

4.2 Saran

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja diatas, maka ada beberapa saran-saran yang perlu disampaikan yaitu:

- Perlu ditingkatkan kompetensi aparat (kualitas SDM) Dinas Pertanian untuk mencapai prioritas sasaran berdasarkan Renstra.
- Perlu selalu ditingkatkan sinkronisasi koordinasi dan kerja sama baik level horizontal maupun vertikal.
- Perlu ditingkatkan prasarana dan sarana untuk kelancaran administrasi dan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan.
- Kebijakan yang dapat diambil antara lain:

- Meningkatkan basis produksi secara berkelanjutan. Pengembangan kawasan pertanian,
- Meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan SDM pertanian. Pengembangan sarana dan prasarana pertanian serta infrastruktur pertanian.
- Penguatan petugas pengendalian organisme pengganggu tanaman (POPT).
- Meningkatkan promosi dan pengembangan kualitas komoditas pertanian.
- Menyediakan benih unggul bermutu bagi petani pelaku usaha perkebunan.
- Menentukan kawasan agrobisnis peternakan yang potensial untuk dikembangkan.
- Sosialisasi bahaya penyakit hewan menular dan zoonosis.
- Peningkatan jumlah petugas respon cepat tentang penanggulangan penyakit zoonosis

Akhir kata semoga laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2025 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan untuk tahun berikutnya.

Lampiran 2. Rencana, Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Pada Dinas Pertanian Kab Tabanan

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	
					2021		2022		2024		2024		2025		2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						APBD		APBD		APB D		APBD		APBD		APBD
		URUSAN PERTANIAN				40,262,336,447		38,596,687,073		36,524,429,820		37,855,866,776		38,985,364,948		40,148,814,173
Tujuan 1: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Indikator: Persentase Peningkatan nilai SAKIP	Sasaran 1: Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Indikator: Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator: Terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD			100%	35,932,259,947	100%	31,164,187,223	100%	31,086,876,688	100%	31,582,941,270	100%	32,252,939,517	100%	33,101,336,416
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator: Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	7,000,000	100%	8,000,000	100%	9,000,000	100%	10,000,000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator: Jumlah tersusunnya dokumen renstra renja		2 Dokumen	3,000,000	2 Dokumen	3,000,000	2 Dokumen	4,000,000	2 Dokumen	4,500,000	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,500,000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikatornya: Jumlah tersusunnya dokumen LKjIP		1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,500,000	1 Dokumen	4,000,000	1 Dokumen	4,500,000
			Administrasi Keuangan Perangkat		100%	33,471,659,862	100%	29,005,211,423	100%	28,954,004,008	100%	29,030,645,179	100%	29,532,031,849	100%	30,384,817,721

Daerah Indikator: Persentase terselenggar anya administrasi keuangan yang mendukung kelanccaran tugas dan fungsi PD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator: Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	33,444 ,270,7 86	100%	28,977, 711,423	100%	28,92 5,129 ,008	100%	29,000,3 26,429	100%	29,500, 197,161	100%	30,351, 391,299
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD Indikator: Persentase terpenuhinya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifik asi keuangan SKPD	100%	20,000 ,000	100%	20,000, 000	100%	21,00 0,000	100%	22,050,0 00	100%	23,152, 500	100%	24,310, 125
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semestera n SKPDIndikator: Jumlah tersusunnya laporan keuangan	2 dokumen	7,389, 076	2 dokume n	7,500,0 00	2 dokum en	7,875 ,000	2 dokum en	8,268,75 0	2 dokume n	8,682,1 88	2 dokume n	9,116,2 97
	Administrasi Umum Perangkat daerah Indikator: Persentase terselenggar anya administrasi umum Yang Mendukung Kelanccaran												
		100%	192,11 9,010	100%	227,152 ,200	100%	302,5 62,46 0	100%	324,707, 593	100%	341,927 ,488	100%	359,023 ,863
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Indikator: Tersedianya Komponen	100%	5,000, 000	100%	2,223,0 00		2,334 ,150		2,450,85 8		2,573,4 00		2,702,0 70

Tugas dan Fungsi PD	Instlasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator: Tersedianya Peralatan Rumah tangga Lainnya	100%	6,000,000	100%	4,444,700	100%	4,666,935	100%	4,900,282	100%	5,145,296	100%	5,402,561
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator: Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	61,626,500	100%	50,000,000	100%	55,950,000	100%	58,747,500	100%	61,684,875	100%	64,769,119
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator: Persentase administrasi perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	8,428,000	100%	8,425,000	100%	11,849,900	100%	12,442,395	100%	13,064,515	100%	13,717,740
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	2,160,000	100%	1,980,000	100%	3,300,000	100%	3,465,000	100%	3,638,250	100%	3,820,163

	Penyediaan Bahan/Material Indikator: Tersedianya bahan/material	100%	50,439,510	100%	110,439,500	100%	115,961,475	100%	121,759,549	100%	127,847,526	100%	134,239,902
	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator: Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Daerah	100%	58,465,000	100%	39,640,000	100%	98,000,000	100%	102,900,000	100%	108,045,000	100%	113,447,250
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator: Terpeliharanya arsip pada SKPD	0	0	100%	10,000,000	100%	10,500,000	100%	18,042,010	100%	19,928,626	100%	20,925,057
	Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	575,705,175	100%	238,378,500	100%	50,442,865	100%	257,500,000	100%	325,110,451	100%	156,680,908
	Penunjang Urusan Pemerintah daerah Indikator: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	575,705,175	100%	238,378,500	100%	50,442,865	100%	257,500,000	100%	325,110,451	100%	156,680,908
	Penyediaan Jasa Penunjang	100%	1,546,524,400	100%	1,547,503,900	100%	1,624,879,095	100%	1,706,123,050	100%	1,791,598,786	100%	1,881,178,725

Urusan Pemerintah Daerah Indikator: Persentase Ketersediaan Jasa	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator: Tersedianya jasa surat Menyurat	100%	8,625,000	100%	8,625,000	100%	9,056,250	100%	9,509,063	100%	10,154,099	100%	10,661,804
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik Indikator: Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	100%	286,495,000	100%	286,499,500	100%	300,824,475	100%	315,865,699	100%	331,658,984	100%	348,241,933
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	1,251,404,400	100%	1,252,379,400	100%	1,314,998,370	100%	1,380,748,289	100%	1,449,785,703	100%	1,522,274,988
Pemeliharaan Barang Milik daerah		100%	141,251,500	100%	140,941,200	100%	147,988,260	100%	255,965,448	100%	253,270,943	100%	309,635,200
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator: Persentase Terpeliharaan ya Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kencaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator: Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100%	106,661,500	100%	106,651,200	100%	111,983,760	100%	117,582,948	100%	123,462,095	100%	129,635,200

				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator: Tersedianya Peralatan Mesin Lainnya	100%	34,590,000	100%	34,290,000	100%	36,004,500	100%	138,382,500	100%	129,808,848	100%	180,000,000
Tujuan 2: Meningkatkan Produktivitas Komoditas Pertanian Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Pertanian	Sasaran 1: Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator: Persentase Peningkatan Produksi Pertanian			10%	716,826,500	10%	1,690,632,950	10%	804,340,902	10%	1,291,268,759	10%	1,406,887,381	10%	1,573,668,180
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator: Persentase Penggunaan Sarana Pertanian		50%	463,076,500	50%	228,132,950	55%	659,601,527	60%	1,151,295,690	65%	1,269,008,069	70%	1,444,474,631
				Pengawasan Penggunaan Sarana Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik LokasiPertanian Indikator: Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		0		123,500,000		100,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Indikator: Perluasan Areal Tanam Padi dan Jagung	10 Kec	463,076,500	10 Kec	104,632,950	10 Kec	559,601,527	10 Kec	951,295,690	10 Kec	1,069,008,069	10 Kec	1,244,474,631
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik		1 jenis	103,750,000	2 jenis	95,000,000	3 jenis	114,384,375	4 jenis	120,103,594	5 jenis	126,108,773	6 jenis	126,108,773

			(SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SGD Hewan/Tanaman	0	0	0	95,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
			Indikator: Jumlah Pengelolaan Sumber Daya	Pemanfaatan SDG Hewan /Tanaman	0	103,750,000	4 jenis tanaman	0	4 jenis tanaman	114,384,375	4 jenis tanaman	120,103,594	4 jenis tanaman	126,108,773	4 jenis tanaman	126,108,773
				Indikator: Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman												
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota Lain		15 ekor dan 18500 pohon/Stek	150,000,000	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	1,367,500,000	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	30,355,000	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	19,869,475	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	11,770,539	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	3,084,776
			Indikator: Jumlah Penyediaan Benih/ Bibit Ternak	Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	150,000,000	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	1,367,500,000	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	30,355,000	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	19,869,475	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	11,770,539	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	3,084,776
Tujuan 2: Meningkatnya	Sasaran 2: Meningkat	PROGRAM PENYEDI			10%	3,062,500,000	10%	4,780,491,900	10%	4,225,024,730	10%	4,398,775,472	10%	4,726,238,737	10%	4,857,525,899

Produktivitas Komoditas Pertanian Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Pertanian	tkan Prasarana dan Sarana Pertanian Indikator: Persentase Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	AAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Perkebunan dan Peternakan	Pengembangan Prasarana Pertanian Indikator: Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik		50%	200,000,000	52%	1,315,116,900	54%	402,003,400	56%	499,178,893	58%	484,796,993	60%	507,929,320
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan / LCP2B Indikator: Tersusunnya Perda Lp2B, KP2B dan LCP2B	n/a	0	3 dokumen	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0
				Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Indikator: Tersedianya data Lahan Pertanian Yang Berkelanjutan	n/a	0	1 dokumen	47,500,000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Indikator: Persentase meningkatnya Hasil Pertanian, tersedianya Prasarana Pertanian	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	1,220,116,900	1 dokumen	350,000,000	1 dokumen	441,845,165	1 dokumen	424,596,579	1 dokumen	444,718,885

		Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan Indikator: Tersedianya Data Statistik Pertanian	1 Tahun	100,00 0,000	1 Tahun	47,500, 000	1 Tahun	52,00 3,400	1 Tahun	57,333,7 28	1 Tahun	60,200, 414	1 Tahun	63,210, 435
	Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator: Jumlah Meningkatnya Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik		57 unit	2,862, 500,00 0	77 unit	3,465,3 75,000	97 unit	3,823 ,021, 330	117 unit	3,899,59 6,579	137 unit	4,241,4 41,744	157 unit	4,349,5 96,579
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Indikator: tersedianya Prasarana Pertanian	7 unit	837,50 0,000	32 unit	2,795,3 75,000	49 unit	1,798 ,021, 330	67 unit	1,724,59 6,579	82 unit	1,916,4 41,744	100 unit	1,724,5 96,579
		Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Indikator: Tersedianya Embung Pertanian dalam Kondisi Baik	1 unit	175,00 0,000	4 unit	0	5 unit	175,0 00,00 0	6 unit	175,000, 000	7 unit	175,000 ,000	8 unit	175,000 ,000
		Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Indikator: Terbangunnya dan Terehabilitasinya Jalan Usaha Tani dalam Kondisi Baik	40 unit	1,000, 000,00 0	47 unit	370,000 ,000	52 unit	1,000 ,000, 000	58 unit	1,150,00 0,000	65 unit	1,300,0 00,000	72 unit	1,600,0 00,000

Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit Indikator: Terbangun dan terehabilitasinya Dam Parit dalam kondisi baik	2 unit	350,00 0,000	6 unit		8 unit	350,0 00,00 0	10 unit	350,000, 000	12 unit	350,000 ,000	14 unit	350,000 ,000
Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air Indikator: Terbangun dan Terehabilitasinya Pintu Air dalam Kondisi Baik	6 unit	100,00 0,000	10 unit		12 unit	100,0 00,00 0	14 unit	100,000, 000	16 unit	100,000 ,000	18 unit	100,000 ,000
Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Indikator: Terbangun dan Terehabilitasinya Rumah Potong Hewan dalam Kondisi Baik	1 unit	0	1 unit		1 unit	0	1 unit	0	1 unit	0	1 unit	0
Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya Indikator: Terbangun dan Terehabilitasinya Balai Penyuluh di Kecamatan	10 unit	200,00 0,000	10 unit		10 unit	200,0 00,00 0	10 unit	200,000, 000	10 unit	200,000 ,000	10 unit	200,000 ,000

				Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Lainnya Indikator: Terbangun dan Terehabilitasinya Prasarana Lainnya dalam Kondisi Baik	3 unit	200,000,000	3 unit	300,000,000	3 unit	200,000,000	3 unit	200,000,000	3 unit	200,000,000	3 unit	200,000,000
Tujuan 2: Meningkatkan Produktivitas Komoditas Pertanian Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Pertanian	Sasaran 3: Meningkatkan Produktivitas Peternakan Indikator: Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapannya pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator: Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapannya pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner			95%	223,250,000	96%	470,000,000	97%	236,250,000	98%	238,612,525	99%	250,543,125	100%	263,070,282
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota Indikator: Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		6000 ekor	188,250,000	8000 ekor	470,000,000	11000 ekor	236,250,000	14000 ekor	198,095,650	17000 ekor	208,000,406	21000 ekor	218,400,427
			Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Indikator: Terlaksananya Vaksinasi, tersedianya Obat-obatan dan Operasional Vaksinasi		10 Kecamatan	188,250,000	10 Kecamatan	470,000,000	10 Kecamatan	236,250,000	10 Kecamatan	198,095,650	10 Kecamatan	208,000,406	10 Kecamatan	218,400,427

			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator: Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan		100 dokumen	35,000 ,000	110 dokume n	0	120 dokum en	0	130 dokum en	40,516,8 75	140 dokume n	42,542, 719	150 dokume n	44,669, 855
			Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk HewanIndikator: Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan		100 dokumen	35,000 ,000	110 dokume n	0	120 dokum en	0	130 dokum en	40,516,8 75	140 dokume n	42,542, 719	150 dokume n	44,669, 855
Tujuan 2: Meningkatkan Produktivitas Komoditas Pertanian Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Pertanian	Sasaran 4: Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Indikator: Meningkatkan Kelas Kemampuan Kelompok Meningkatkan Kompetensi Penyuluh	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Indikator: Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibangun oleh penyuluh			40%	163,75 0,000	45%	491,375 ,000	50%	171,9 37,50 0	55%	172,134, 375	60%	174,378 ,094	65%	176,606 ,698
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Indikator: Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil Meningkatkan n Kelas		25%	163,75 0,000	27%	491,375 ,000	30%	171,9 37,50 0	34%	172,134, 375	39%	174,378 ,094	45%	176,606 ,698
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Indikator: Terlaksananya Kegiatan Penyuluh yang Tepat guna dan Tersusunnya Program Tingkat Desa Kecamatan dan Kabupaten	144 Buku	163,75 0,000	144 Buku	277,625 ,000	144 Buku	171,9 37,50 0	144 Buku	172,134, 375	144 Buku	174,378 ,094	144 Buku	176,606 ,698	

				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan Indikator: Terlaksananya Kegiatan Penyuluh yang Tepat guna dan Tersusunnya Programa Tingkat Desa Kecamatan dan Kabupaten			213,750 ,000										
--	--	--	--	---	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



පිළිතුරු කළ පැහැදිලි කිරීම්
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
මහලංගි පැහැදිලි කිරීම්
DINAS PERTANIAN

රාජ්‍ය සේවා මධ්‍යස්ථානය, පුරාණ මාර්ග, පුරාණ මාර්ග, පුරාණ මාර්ග, පුරාණ මාර්ග
JALAN GATOT SUBROTO II, NOMOR 1, TELEPON : (0361) 810937
Website: <http://distantan.tabanankab.go.id/> dan Email: distantan@tabanankab.go.id
Sanggulan - Tabanan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Made Subagia, S.Pi., M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Jabatan : Bupati Tabanan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Tabanan,


Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M

Singasana, 30 Januari 2025

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Tabanan


I Made Subagia, S.Pi., M.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERTANIAN KABUPATEN TABANAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Formula	Target
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di OPD	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Hasil evaluasi inspektorat	90
2.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil evaluasi inspektorat	79
3.	Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan dan peternakan.	Persentase Peningkatan Produktivitas Hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan	Nilai Produktivitas Komoditas Pertanian	10%
4.	Meningkatkan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	10%
5.	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan dan jumlah Unit Usaha yang tersertifikasi NKV	99%
6.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Meningkatnya Kelas Kemampuan Kelompok Meningkatkan Kompetensi Penyuluh	Jumlah Penyuluh dan petani yang Berprestasi	60%

No.	Program	Indikator	Definisi Operasional / Formula	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	Produksi Tahun ke-n dikurangi produksi tahun (n-1) dibagi produksi tahun (n-1) dikalikan seratus persen	10%	3.427.500.000
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Perkebunan dan Peternakan	Produktivitas Tahun ke-n dikurangi produktivitas tahun (n-1) dibagi	10%	2.171.752.000

	Veteriner/	veteriner			
4.	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	Jumlah Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian yang Dibina oleh Penyuluh dibagi Total Jumlah Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian dikalikan Seratus Persen	60%	195.000.000
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Distan Tabanan)	Jumlah Realisasi Anggaran Dibagi Jumlah Pagu Anggaran Dikalikan Seratus Persen	100%	24.094.182.600

Singasana, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Bupati Tabanan,


Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Tabanan

I Made Subagia, S.Pi., M.M.

LAMPIRAN TAMBAHAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN TABANAN

I. Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional / Formula	Target	Ket
1	Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah					
	Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Produktif dan Inovatif	Sekolah Lapang (SL) Tematik Budidaya Padi Ramah Lingkungan Menuju Pertanian Organik	Indikator Khusus: Persentase penurunan penggunaan pestisida dan pupuk kimia	Jumlah penggunaan pupuk kimia setelah dilaksanakan SL dibagi dengan jumlah penggunaan pupuk kimia sebelum dilaksanakannya SL dikalikan seratus persen	50%	
			Indikator Umum: Kelembagaan petani yang melaksanakan SL Budidaya Padi Ramah Lingkungan	Jumlah kelembagaan petani yang melaksanakan SL Budidaya Padi Ramah Lingkungan	1 (satu) Kelembagaan	

II. Kinerja Wajib						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional / Formula	Target	Ket
1	Capaian Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Capaian Pengembangan Kompetensi ASN dalam 1 Tahun (20 JP)	Jumlah ASN yang Telah Memenuhi 20 JP Dibagi jumlah Total ASN dalam 1 Tahun dikali 100%	80%	
2	Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan Website Perangkat Daerah yang Efektif	Persentase Informasi Publik dan Dokumentasi yang dimuat dalam Website Perangkat Daerah (sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16 Tahun 2017)	Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang sudah termuat dibagi jumlah Informasi dan Dokumentasi yang wajib dimuat dikali	100	

				seratus persen		
3	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	Pemenuhan Kriteria Standar Pelayanan Publik (Ombudsman)	Hasil Penilaian Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tabanan	81	
4	Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Realisasi belanja barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri	Persentase belanja barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri	Belanja PDN dibagi belanja pengadaan dikali 100%	40%	
				Belanja UMKM dibagi belanja pengadaan dikali 100%	40%	
5	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan	Pengawasan Kearsipan	Hasil penilaian atas implementasi/Penerapan Norma, Standar, Prinsip, Kaedah (NSPK) kearsipan dalam manajemen tata Kelola kearsipan pada Perangkat Daerah sebagai obyek pengawasan	Nilai Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	60	

III. PERANGKAT DAERAH DENGAN KINERJA KHUSUS <i>(Lampiran ini khusus dibuat oleh Perangkat Daerah Terkait dari masing-masing Kategori)</i>					
A. Kategori Penyusunan Perda dan Perbup sesuai arah Kebijakan Daerah					
No	Perangkat Daerah yang Terkait	Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional / Formula	Target	Ket.
1.	Dinas Pertanian	Produk hukum (Perda dan/atau Perbup) yang disusun sesuai arah kebijakan Daerah	Jumlah produk hukum (Perda dan/atau Perbup) yang disusun OPD sesuai Keputusan Bupati / DPRD tentang Program Pembentukan Perbup / Perda	1 Perda	

B Kategori Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
No	Perangkat Daerah yang Terkait	Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional / Formula	Target	Ket.
1	Dinas Pertanian	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan	Realisasi capaian PAD dibagi dengan target dikali 100%	100%	

Pihak Kedua
Bupati Tabanan,

Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Singasana, 30 Januari 2025

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Tabanan

I Made Subagia, S.Pi., M.M.



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/120/03/HK/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi, maka dipandang perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2025;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/120/03/HK/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA DINAS
PERTANIAN KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025

- Penanggung Jawab : Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan.
- Pengarah : Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan.
- Ketua : Kasubag Umum dan Keuangan Dinas Pertanian
Kabupaten Tabanan.
- Anggota : Para Kabid pada Dinas Pertanian Kabupaten
Tabanan.

BUPATI TABANAN
PLT. KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TABANAN,
MADE SUBAGIA, S.Pi, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196603081989031012



- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan persiapan dengan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi secara efektif dan berkelanjutan baik internal maupun eksternal dalam kebutuhan penyusunan dokumen dimaksud; dan
 - c. melaporkan hasil penyusunan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertanian.
- KETIGA : Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor Rekening 3.27.01.2.01.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal

an. BUPATI TABANAN
Kepala Dinas Pertanian
KABUPATEN TABANAN,

I MADE SUBAGIA, S.Pi, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196603081989031012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Inspektur Kabupaten Tabanan;
6. Kepala Badan/Dinas/Bagian se-Kabupaten Tabanan;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
8. Arsip.



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/412/03/HK/2026

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi, maka dipandang perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Laporan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2025 kepada Bupati Tabanan sebagai laporan kinerja sebagaimana yang jelas ditetapkan dalam penetapan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2025

- KETIGA : Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor Rekening 3.27.01.2.01.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal

**BUPATI TABANAN**
PLT. KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TABANAN,
MADE SUBAGIA, S.Pi, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196603081989031012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Inspektur Kabupaten Tabanan;
6. Kepala Badan/Dinas/Bagian se-Kabupaten Tabanan;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
8. Arsip.



**BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI**

**KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/1184/03/HK/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 180/309/03/HK/2025
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PERTANIAN
TAHUN 2025**

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pertanian Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 180/309/03/HK/2025;
 - b. bahwa dengan adanya Hasil Sementara Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, maka Keputusan Bupati Nomor 180/309/03/HK/2025 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 180/309/03/HK/2025 tentang Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pertanian Tahun 2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 180/309/03/HK/2025 tentang Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pertanian Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 16 Desember 2025

an. BUPATI TABANAN
PLT. KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TABANAN,



NIP. 19660308 198903 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Inspektur Kabupaten Tabanan;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/1184/03/HK/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR 180/467/03/HK/2025
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS PERTANIAN TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PERTANIAN TAHUN 2025

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/DIF INISI OPERASIONAL /METTA DATA IKU	METODELOGI /DISKRIPSI IKU	SUMBER DATA	KET/ PENANG GUNG JAWAB
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Realisasi dibagi dengan target dikalikan seratus persen	Data dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), rekap dilakukan per triwulan.	Data diambil dari SPJF	Kadis Pertanian
2	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian	Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	Selisih produksi n dan produksi n-1 dibagi produksi n dikalikan seratus persen	Data diperoleh dari petugas data kecamatan, diinput oleh petugas data kabupaten tiap awal bulan.	Data diambil dari Statistik Pertanian	Kadis Pertanian
		Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Perkebunan dan Peternakan	Selisih produktivitas n dan produktivitas n-1 dibagi produktivitas n dikalikan seratus persen	Data diperoleh dari petugas data kecamatan, diinput oleh petugas data kabupaten tiap awal bulan.	Data diambil dari Statistik Pertanian	Kadis Pertanian
		Meningkatkan Produktivitas Peternakan	Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah pelayanan kesehatan hewan dibagi jumlah ternak dibagi seratus persen	Data diperoleh dari Pusat kesehatan Hewan	Data diambil dari Statistik Peternakan	Kadis Pertanian
		Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina dibagi Jumlah total Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian dikalikan seratus persen	Data diambil dari Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian sebuah sistem berbasis web yang dikembangkan Kementerian Pertanian untuk mengelola data kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluh, dan pelaku utama (petani/kelompok tani) agar	Data diambil dari Simluhtan	Kadis Pertanian

					penyusunan kebijakan pertanian lebih akurat dan efisien.		
--	--	--	--	--	--	--	--



BUPATI TABANAN
PLT. KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TABANAN,

MADE SUBAGIA, S.Pi, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660308 198903 1 012